



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA PHPU 2019

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN
PERKARA PHPU 2019

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

1

Pengajuan Permohonan *Online* Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai



2

Pengajuan Permohonan *Online* Calon Anggota DPR/DPRD Perseorangan Melalui DPP Partai



3

Pengajuan Permohonan *Online* Perseorangan Calon Anggota DPD



4

Pengajuan Permohonan *Online* Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu



6

Tempat Duduk Sidang



7

Case Retrieval dan Case Tracking Perkara



8

Fasilitas Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)



PENDAHULUAN

“ UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 466
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 474 ayat (1)
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM pasal 475 ayat (1)
“Dalam Hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”

”

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“ Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

Target Pemahaman dalam Bimtek penanganan perkara berbasis elektronik sbb:

- ✓ Mendapatkan Informasi Kemudahan Akses Dalam Berperkara di MK
- ✓ Peran selaku Kuasa Pemohon
 - ✓ Capres/Cawapres,
 - ✓ DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 - ✓ DPD
- ✓ Peran selaku Kuasa Termohon
- ✓ Peran selaku Kuasa Terkait
- ✓ Peran selaku Kuasa Bawaslu
- ✓ Informasi dan Layanan Online yang Update

Kemudahan Akses Berperkara di MK

- ✓ Database Calon Peserta Pemilu
- ✓ Pengiriman Dokumen Digital MK ke Kuasa dan Para Pihak melalui email Para Pihak
- ✓ Data Dashboard PHP Pemilu Online
- ✓ Pengajuan Permohonan secara Online
- ✓ Pengajuan Permohonan Offline/Hadir di MK dengan sistem antrian berbasis elektronik
- ✓ Layanan Pojok Digital Mandiri di Gedung MK
- ✓ Live Digitalisasi Online Dokumen Perkara
- ✓ Persidangan Jarak Jauh
- ✓ Streaming Persidangan MK
- ✓ Case Tracking
- ✓ Case Retrieval
- ✓ Click MK
- ✓ Konsultasi dan Tanya Jawab Online
- ✓ Produk Administrasi Kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik sehingga tidak bisa dipalsukan
- ✓ Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang
- ✓ Hubungi MK
- ✓ Pengaduan ke MK

Persiapan Sebuah Permohonan Online

- ✓ Paket Internet
- ✓ Smartphone
- ✓ Dekstop/Notebook
- ✓ Camera Photo Smartphone
- ✓ E-Mail di smartphone dan Dekstop
- ✓ Whatsapp Web
- ✓ Hotspot Seluler 4G
- ✓ KTP
- ✓ Alamat Email
- ✓ Nomor HP
- ✓ Daftar Kuasa Hukum jika menggunakan kuasa
- ✓ Digitalisasi Materi Permohonan
- ✓ Dipersiapkan oleh DPP Partai Politik dan Dapat dibantu oleh seluruh DPD Partai Politik

Login Online PHPU Calon Legislatif, dan Capres/Cawapres

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan login DPP Partai Politik
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah login Kuasa dan atau principle
- ✓ PHPU Capres/Cawapres Login Kuasa dan atau Principle

Kuasa Pemohon/Terkait

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden

Catatan Login:

- ✓ Login dengan profile Kuasa hanya untuk PHPU Dewan Perwakilan Daerah dan PHPU Capres/Cawapres
- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan melalui Collaborasi dengan DPP Partai Politik

Kuasa Termohon

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden

Kuasa Bawaslu

- ✓ PHPU DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kot, Perseorangan
- ✓ PHPU Dewan Perwakilan Daerah
- ✓ PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pentingnya e-mail dan Nomor HP Para Pihak

Email Para Pihak akan senantiasa rutin mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan dan Dokumen Hukum Mahkamah Konstitusi:

- ✓ Mendapatkan login untuk mengajukan permohonan online dan mendapatkan Tanda Terima Online
- ✓ Mendapatkan Dokumen Administrasi Kepaniteraan MK: Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, Akta Permohonan Lengkap/Belum Lengkap, Akta Registrasi Perkara, Pemberitahuan Sidang Pertama, Penyampaian Jadwal Sidang, Penyampaian Salinan Permohonan, Penyampaian Jawaban Termohon, Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, Penyampaian Salinan Putusan
- ✓ Seluruh dokumen produk MK telah menggunakan sertifikasi dan tanda tangan elektronik

Pentingnya Nomor HP Para Pihak

- ✓ Sebagai media komunikasi yang handal antara Juru Panggil MK dengan Para Pihak

Pentingnya Sempel

- ✓ Memberikan Kemudahan Para Pihak dalam mengajukan permohonan online di MK
- ✓ Menyimpan semua dokumen permohonan dan tanda terima permohonan
- ✓ Menyimpan tracking permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait
- ✓ Media untuk mendaftarkan tempat duduk di ruang sidang dan plotting kehadiran para pihak di MK secara online
- ✓ Sempel senantiasa always on dan siap dientry kapanpun dan tidak pernah ada penolakan terkait waktu.

Pengajuan Permohonan Hadir di MK (Offline)

- ✓ Menyiapkan Dokumen Permohonan Per Propinsi
- ✓ Mengisi dan mendapatkan NUPP
- ✓ Memilih Para Pihak (Capres/Cawapres, Partai Politik (Parpol), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)).
- ✓ Memilih Propinsi
- ✓ Masukkan NIK dan Nomor HP
- ✓ Foto Diri
- ✓ Mendapatkan Waktu Permohonan
- ✓ Menunggu Panggilan Antrian

SIMPEL (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ONLINE)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”



- 1. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai**

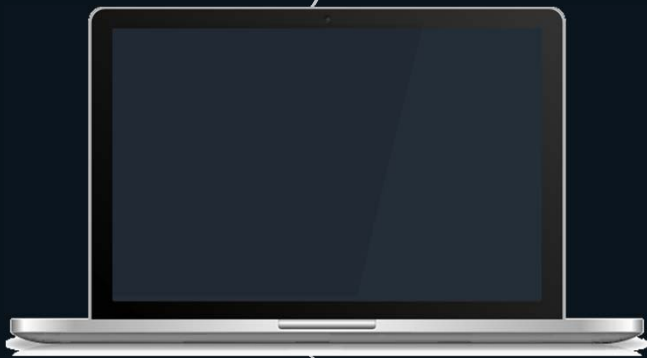
Permohonan PPHU DPR/DPRD Tahun 2019



Permohonan PPHU
DPD Tahun 2019

Permohonan PPHU
Presiden dan Wakil
Presiden





a. **PENDAFTARAN
PERMOHONAN PHPU
ANGGOTA DPR/DPRD
MELALUI DPP PARTAI**



b. **PENDAFTARAN PERMOHONAN
PHPU ANGGOTA DPR/DPRD
MELALUI PERSEORANGAN**

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

DPP partai politik harus mendaftarkan pada SIMPEL untuk mendapatkan akun log in DPP Partai Politik. Langkah berikutnya DPP Parta Politik akan mengisi profile DPP Partai Politik

PMK No. 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1):

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2):

“Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

RI [Tentang Simpel](#) [Panduan Aplikasi](#) [Kontak](#) [FAQ](#)

PENDAFTARAN AKUN DPP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

Partai Politik :

Nama Ketua/Sejenisnya

NIK

Nama Sekjen/Sejenisnya

NIK

Alamat Partai

No Telepon

No Fax

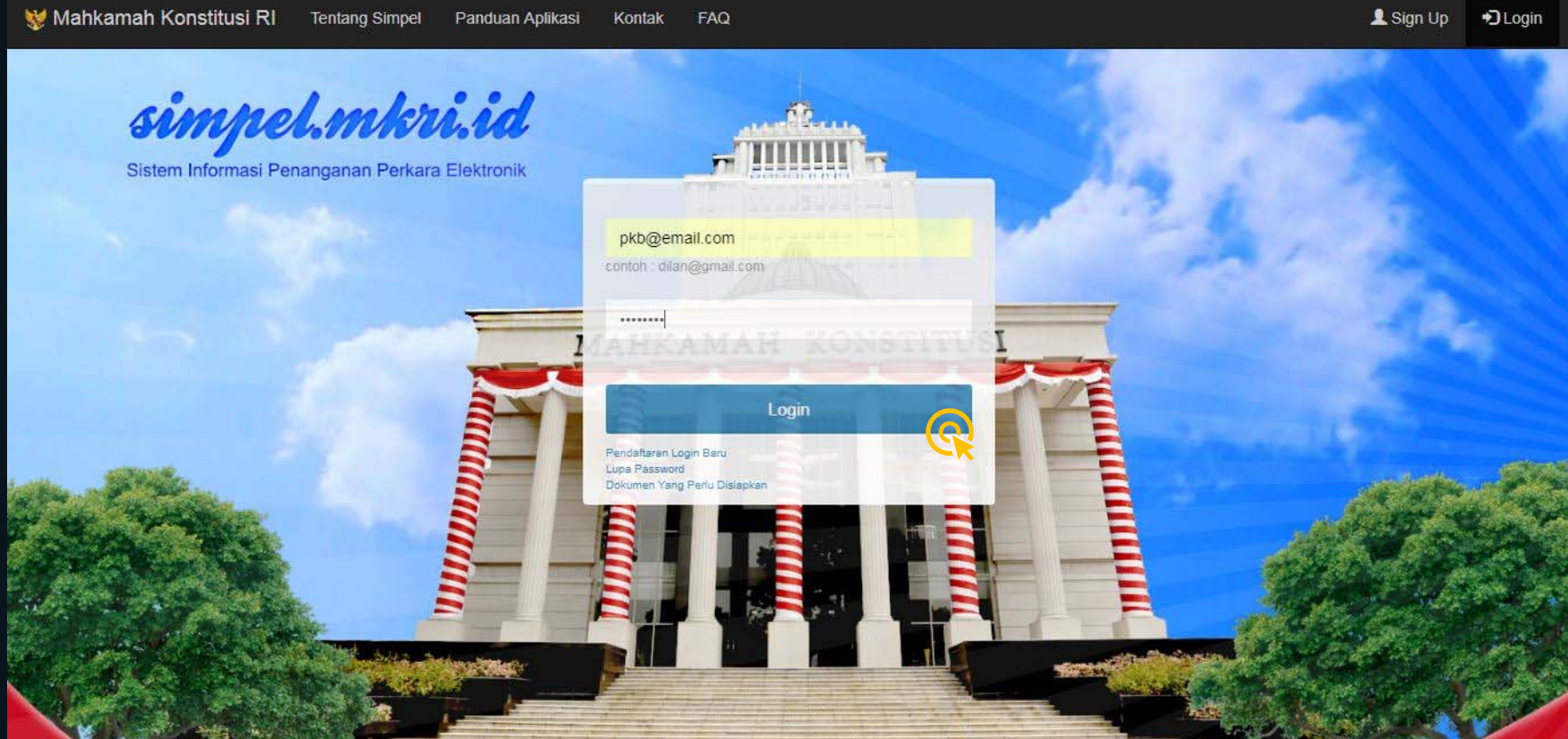
No HP

Email

Password

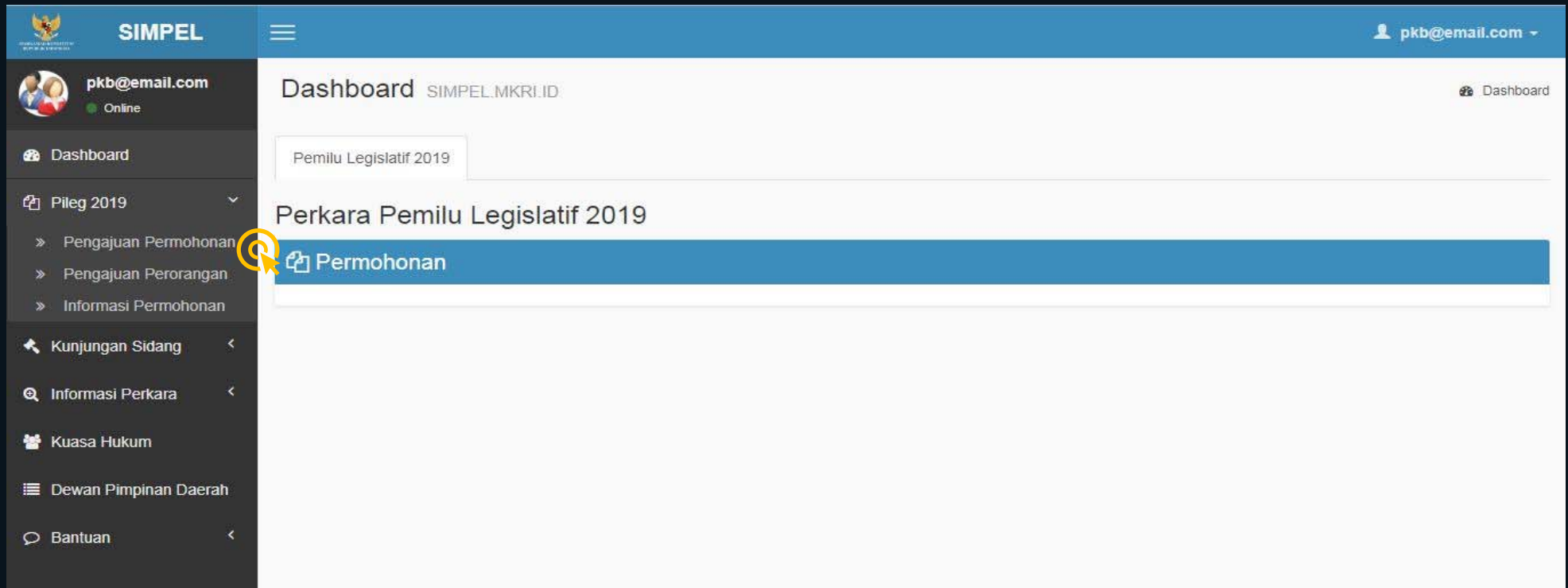
Form pendaftaran akun DPP partai politi peserta pemilu 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPD Melalui DPP Partai



Login setelah daftar akun sebagai DPP Partai Politik

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai



The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com' with a 'Dashboard' link, and a hamburger menu icon. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Dashboard > SIMPEL.MKRI.ID > Pemilu Legislatif 2019'. Below this, the title 'Perkara Pemilu Legislatif 2019' is followed by a list of menu items: 'Permohonan' (highlighted in blue), 'Pileg 2019', 'Pengajuan Permohonan', 'Pengajuan Perorangan', and 'Informasi Permohonan'. A yellow circle with a cursor points to the 'Permohonan' menu item. The left sidebar contains various navigation options such as 'Dashboard', 'Pileg 2019', 'Kunjungan Sidang', 'Informasi Perkara', 'Kuasa Hukum', 'Dewan Pimpinan Daerah', and 'Bantuan'.

DPP Partai Politik setelah *log in* pada tampilan utama, dapat mendaftarkan pengajuan permohonan 34 provinsi, memilih kuasa hukum lebih dari 1, serta membuat akun sesuai dengan DPD Partai Politik;

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The header includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a navigation menu. The main content area displays the title 'Permohonan Online' and 'Persetisihan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. Below this, there is a large heading 'PERMOHONAN ONLINE PERKARA PEMILU LEGISLATIF' and a paragraph explaining the application process: 'Tanggal dan jam saat pembuatan tiket digunakan sebagai tanggal dan jam pengajuan permohonan yang akan dicatat di dalam APPP (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon), tiket berlaku selama 1x24 jam sejak tiket buat, anda diharusnya mengisi kelengkapan data-data permohonan per Provinsi yang telah dipilih sebelum masa berlaku tiket habis.' A prominent blue button labeled 'Buat Tiket Pengajuan Permohonan' is visible, with a yellow cursor icon pointing to it.

Waktu pembuatan tiket adalah waktu yang dicatat dalam pengajuan permohonan (APPP). Pemohon dapat melengkapi permohonan dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembuatan tiket. Tiket akan hilang secara

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The header includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a navigation menu. The main content area is titled 'PILIH PROVINSI YANG BERSENGKETA' and displays a grid of 30 Indonesian provinces, each with a checkbox. A yellow cursor icon is positioned over the 'Papua Barat' checkbox. A 'Simpan' button is located at the bottom left of the grid.

SIMPEL pkb@email.com Online

Dashboard
Pileg 2019
Kunjungan Sidang
Informasi Perkara
Kuasa Hukum
Dewan Pimpinan Daerah
Bantuan

Rabu, 26 September 2018
21:55:25

PILIH PROVINSI YANG BERSENGKETA

<input type="checkbox"/> Aceh	<input type="checkbox"/> Sumatera Utara (Sumut)	<input type="checkbox"/> Sumatera Barat (Sumbar)
<input type="checkbox"/> Riau	<input type="checkbox"/> Jambi	<input type="checkbox"/> Sumatera Selatan (Sumsel)
<input type="checkbox"/> Kepulauan Bangka Belitung	<input type="checkbox"/> Bengkulu	<input type="checkbox"/> Lampung
<input type="checkbox"/> Kepulauan Riau	<input type="checkbox"/> Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	<input type="checkbox"/> Jawa Barat (Jabar)
<input type="checkbox"/> Jawa Tengah (Jateng)	<input type="checkbox"/> Jawa Timur (Jatim)	<input type="checkbox"/> Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
<input type="checkbox"/> Banten	<input type="checkbox"/> Bali	<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Barat (NTB)
<input type="checkbox"/> Nusa Tenggara Timur (NTT)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Barat (Kalbar)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Tengah (Kalteng)
<input type="checkbox"/> Kalimantan Selatan (Kalsel)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Timur (Kaltim)	<input type="checkbox"/> Kalimantan Utara (Kaltara)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Utara (Sulut)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tengah (Sulteng)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Selatan (Sulsel)
<input type="checkbox"/> Sulawesi Barat (Sulbar)	<input type="checkbox"/> Sulawesi Tenggara (Sultra)	<input type="checkbox"/> Gorontalo
<input type="checkbox"/> Maluku	<input type="checkbox"/> Maluku Utara (Malut)	<input type="checkbox"/> Papua
<input type="checkbox"/> Papua Barat		

Simpan

DPP Partai Politik memilih Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The header includes the SIMPEL logo and the user profile 'pkb@email.com'. The main content area shows a notification for an online application deadline for the 2019 Pileg (Regional Representative Council) election. The deadline is set for September 27, 2018, at 10:01 WIB. The notification states that the ticket is valid until September 28, 2018, at 10:01 WIB and that users must complete their application data by province before the deadline. A list of three provinces is shown: Aceh, Riau, and Kepulauan Bangka Belitung. The Riau entry has a yellow circular icon with a magnifying glass over it.

Tanggal Tiket 27-09-2018 pukul 10:01 WIB
Tiket berlaku sampai tanggal 28-09-2018 pukul 10:01 WIB
Anda harus melengkapi data permohonan per Provinsi sebelum masa berlaku tiket habis.

1. Aceh
2. Riau
3. Kepulauan Bangka Belitung

Contoh DPP Partai Politik telah memilih 3 Provinsi yang menjadi objek perselisihan hasil pemilu pada 27 September 2018 pukul 10.01

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL pkb@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Pemilihan Legislatif DPR/DPRD Tahun 2019

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

Permohonan Online

Provinsi: Riau

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Pemohon

Partai Politik:	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nama Ketua:	RUDI
Nama Sekjen:	ALEX
Alamat:	11alamat
Email:	dpd@email.com
Nomor Telepon:	11
Nomor Handphone:	11

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

[Simpan Sementara](#) [Selanjutnya](#)

DPP Partai melengkapi isian aplikasi PPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The header includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a navigation menu. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'Persetelahan Hasil Pemilihan Umum DPR/DPRD'. The breadcrumb trail is 'Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online'. The main heading is 'PILIH DAERAH PEMILIHAN YANG BERSENGKETA DAPIL ANGGOTA DPR'. Below this, there are two sections: 'DAPIL ANGGOTA DPRD' and 'DAPIL ANGGOTA DPRD'. The 'DAPIL ANGGOTA DPRD' section contains two boxes: 'Riau I Partai Terkait' and 'Riau II Partai Terkait'. The 'DAPIL ANGGOTA DPRD' section contains eight boxes: 'Riau 1 Partai Terkait', 'Riau 2 Partai Terkait', 'Riau 3 Partai Terkait', 'Riau 4 Partai Terkait', 'Riau 5 Partai Terkait', 'Riau 6 Partai Terkait', 'Riau 7 Partai Terkait', and 'Riau 8 Partai Terkait'. At the bottom, there are two buttons: 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya'. The left sidebar shows the user's profile, navigation menu, and a date/time display: 'Rabu, 26 September 2018 22:10:21'.

DPP Partai Politik memilih pihak terkait sesuai dapil DPR/DPRD yang hendak diajukan permohonan

PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo and the user profile 'pkb@email.com'. The main content area is titled 'Permohonan Online' and shows the 'Pilih Partai Politik Terkait' (Select Related Political Party) step. A modal window is open, showing a grid of party selection options. The selected party is 'Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)'. The modal window includes a 'Simpan' (Save) button and a 'Tutup' (Close) button. The sidebar on the left contains navigation options: Dashboard, Pileg 2019, Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The date and time 'Rabu, 26 September 2018 22:11:10' are displayed in the bottom left corner.

Pilih Partai Politik Terkait

<input type="checkbox"/> Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	<input checked="" type="checkbox"/> Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	<input type="checkbox"/> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
<input type="checkbox"/> Partai Golongan Karya (Golkar)	<input type="checkbox"/> Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	<input type="checkbox"/> Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
<input type="checkbox"/> Partai Beringin Karya (Berkarya)	<input type="checkbox"/> Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	<input type="checkbox"/> Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
<input type="checkbox"/> Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<input type="checkbox"/> Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	<input type="checkbox"/> Partai Amanat Nasional (PAN)
<input type="checkbox"/> Partai Hati Nurani (Hanura)	<input type="checkbox"/> Partai Demokrat	<input type="checkbox"/> Partai Bulan Bintang (PBB)
<input type="checkbox"/> Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)		

Tutup Simpan

DPP Partai Politik melakukan pemilihan pihak terkait PPHU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'pkb@email.com', and a breadcrumb trail: Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, Pileg 2019, Pengajuan Permohonan, Pengajuan Perorangan, Informasi Permohonan, Kunjungan Sidang, Informasi Perkara, Kuasa Hukum, Dewan Pimpinan Daerah, and Bantuan. The main content area is titled 'Permohonan Online' and 'Berkas Permohonan Online'. It features a section for 'Upload Berkas Permohonan' with five rows of upload fields. Each row has a 'Choose File' button, a file name field (all showing 'No file chosen'), and an 'Upload' button. Below each field is a red asterisk and a file format/size requirement: 1. KTP Pemohon: *.jpg/.png/.gif, max 1 MB. 2. Permohonan: *.pdf, max 3 MB. 3. Daftar Alat/Dokumen Bukti: *.doc/.docx/.xls/.xlsx, max 1 MB. 4. Surat Keputusan Termohon: *.pdf, max 5 MB. 5. Surat Referensi Partai: *.pdf, max 3 MB. At the bottom, there is a 'Kembali' button and a green 'Kirim Permohonan' button. The date and time 'Rabu, 26 September 2018 22:11:56' are displayed in the bottom left corner.

SIMPEL pkb@email.com Online

Permohonan Online Perselisihan Pemilihan Legislatif DPR

Dashboard > Pileg 2019 > List Permohonan > Permohonan Online

Berkas Permohonan Online

Upload Berkas Permohonan

KTP Pemohon	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	<small>*) File harus dengan ekstensi (.jpg/.png/.gif) dan Ukuran file maksimal : 1 MB</small>	
Permohonan	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	<small>*) File harus dengan ekstensi (.pdf) file maksimal : 3 MB</small>	
Daftar Alat/Dokumen Bukti	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	<small>*) File harus dengan ekstensi (.doc/.docx/.xls/.xlsx) dan ukuran file maksimal : 1 MB</small>	
Surat Keputusan Termohon	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	<small>*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 5 MB</small>	
Surat Referensi Partai	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen	<input type="button" value="Upload"/>
	<small>*) File harus dengan ekstensi (.pdf) dan ukuran file maksimal : 3 MB</small>	

Rabu, 26 September 2018 22:11:56

DPP Partai Politik melakukan proses upload / unggah berkas permohonan PHPU DPR/DPRD Tahun 2019

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui DPP Partai

SIMPEL pkb@email.com Online

- Dashboard
- Pileg 2019
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Kuasa Hukum
- Dewan Pimpinan Daerah
- Bantuan

**Rabu, 26
September 2018
22:12:39**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 2

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Riau Tahun 2019

Pemohon : Partai Kebangkitan Bangsa PKB

Kuasa Pemohon :

Tanggal : 26 September 2018 Pukul : 21:53 WIB

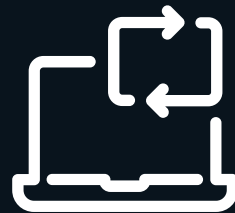


CETAK

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	TIDAK ADA
2	KTP Pemohon	ADA
3	Keputusan Termohon	TIDAK ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
5	Surat Referensi Partai	TIDAK ADA
6	Surat Kuasa	TIDAK ADA
7	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera Pemohon

DPP Partai Politik mendapatkan tanda terima online permohonan PPHU DPR/DPRD Tahun 2019



2. Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Perseorangan Melalui DPP Partai



a. PENDAFTARAN
PERMOHONAN PHPU
ANGGOTA DPR/DPRD
MELALUI DPP PARTAI

b. PENDAFTARAN PERMOHONAN
PHPU ANGGOTAL DPR/DPRD
PERSEORANGAN MELALUI DPP
PARTAI POLITIK



Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui Perseorangan

Terhadap permohonan perseorangan, maka perseorangan caleg yang bersangkutan harus menghubungi DPP Partai Politik untuk didaftarkan melalui aplikasi SIMPEL.MKRI.ID .

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Melalui Perseorangan

SIMPEL pkb@email.com

pkb@email.com Online

- Dashboard
- Pileg 2019
 - Pengajuan Permohonan
 - Pengajuan Perorangan
 - Informasi Permohonan
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Kuasa Hukum
- Dewan Pimpinan Daerah
- Bantuan

Kamis, 27
September 2018
19:02:21

Provinsi: Jawa Barat (Jabar)

Pemilihan: DPR

Dapil: Jabar II

Nama Calon: Calon 689

Menunjuk Kuasa: TIDAK

Identitas Pemohon

Nomor KTP: 4123123123123123

Nama: Calon 689

Alamat: Jalan Mada Merdeka

Email: setiawan.heru69@gmail.com

Nomor Telepon: 0888888888

Nomor Faksimili: 0888888888

Nomor Handphone:

Permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dapil Jabar II Tahun 2019

Form pengisian pengajuan permohonan online secara perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPR/DPRD Perseorangan

SIMPEL pkb@email.com Online

Dashboard | Pileg 2019 | Kunjungan Sidang | Informasi Perkara | Kuasa Hukum | Dewan Pimpinan Daerah | Bantuan

Kamis, 27 September 2018 19:02:58

Tanda Terima Permohonan Online


Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 1/PAN.ONLINE/DPR-DPRD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR Provinsi Jawa Barat Jabar Dapil Jabar II Tahun 2019
Pemohon : Calon 689
Kuasa Permohonan :
Tanggal : 27 September 2018 Pukul : 19:03 WIB



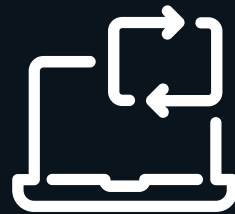
NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	TIDAK ADA
2	KTP Pemohon	TIDAK ADA
3	Keputusan Termohon	TIDAK ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
5	Surat Referensi Partai	TIDAK ADA
6	Surat Kuasa	TIDAK ADA
7	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera
TTD
Kasianur Sidauruk

Pemohon
Calon 689

Catatan :
1. Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
2. Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
3. Apabila want menyerahkan hukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

Tanda terima permohonan online



3. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan Calon Anggota DPD;

Permohonan PHPU
DPR/DPRD Tahun 2019

Permohonan PHPU
DPD Tahun 2019



Permohonan PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden



Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD

PMK No. 3 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1)

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.”

PMK No. 3 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.”

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD

The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pemilu) web application interface. The user is logged in as 'mazmur.alexander@gmail.com'. The main heading is 'Permohonan Online' for the 'PERSISLIHAN PEMILIHAN LEGISLATIF DPD'. The form is divided into several sections:

- Registration Information:** Includes dropdown menus for 'Provinsi' (Aceh), 'Nama Calon' (ANDRI LISKA, S.I.Kom.), and 'Menunjuk Kuasa' (TIDAK).
- Identitas Pemohon (Applicant Identity):** A section with input fields for:
 - Nomor KTP: 1231233123123212
 - Nama: ANDRI LISKA, S.I.Kom.
 - Alamat: Jalan medan merdeka
 - Email: andri@email.com
 - Nomor Telepon: 09801899832
 - Nomor Handphone: 0881111114 (highlighted in yellow)
- Permohonan (Application):** A section for 'PERSISLIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DPD PROVINSI ACEH TAHUN 2019' with a large text area for notes.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan Sementara' (Save Draft) and 'Upload Berkas' (Upload Documents), with a yellow circle highlighting the 'Upload Berkas' button.

Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi form, nama calon sudah terdaftar pada database kemudian upload berkas

Pengajuan Permohonan Online Calon Anggota DPD

SIMPEL mazmur.alexander@gmail.com **CETAK**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : 1/PAN.ONLINE/DPD/2019

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPD Provinsi Aceh Tahun 2019

Pemohon : ANDRI LISKA: S.I.Kom.

Kuasa Pemohon :

Tanggal : **27 September 2018** Pukul : 15:00 WIB

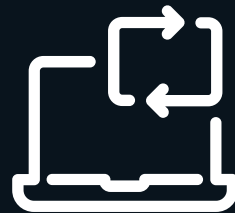


NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	TIDAK ADA
2	KTP Pemohon	TIDAK ADA
3	Keputusan Termohon	TIDAK ADA
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
5	Alat/Dokumen Bukti	TIDAK ADA
6	Surat Kuasa	TIDAK ADA
7	KTP Kuasa	TIDAK ADA

Panitera: Kasianur Sidauruk
TTD:
Pemohon: ANDRI LISKA: S.I.Kom.

Kamis, 27 September 2018
15:01:15

Setelah melakukan pengisian form dan upload berkas pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan online



**4. Pengajuan Permohonan Online Perselisihan
Presiden dan Wakil Presiden;**

Permohonan PHPU
DPR/DPRD Tahun 2019

Permohonan PHPU
DPD Tahun 2019

Permohonan PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden



Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

PMK No. 4 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1)

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”

PMK No. 4 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)

“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”

Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

The screenshot shows the SIMPEL (SIMPEL.MKRI.ID) web application interface. The user is logged in as 'mazmur.alexander@gmail.com'. The main content area displays 'Perkara PUU' and a 'Permohonan' button. The navigation menu on the left includes options like 'Dashboard', 'Pilkada', 'PUU', 'Informasi Perkara', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', 'Pileg 2019 (Beta)', and 'Pemilihan Presiden' (circled in red).

Tampilan untuk pengajuan perselisihan pemilihan presiden dan calon wakil presiden, berbeda dengan pendaftaran akun DPP

Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pemilu) web interface. The user is logged in as 'mazmur.alexander@gmail.com'. The main content area is titled 'Permohonan Online' and contains a form for submitting an application. The form includes a dropdown menu for 'Menunjuk Kuasa' (currently set to 'TIDAK'), a section for 'Identitas Pemohon' (Applicant's Identity) with fields for Name, NIK, and Address for both the President and Vice President candidates, and a section for 'Permohonan' (Application) with a text area for the election year. At the bottom, there are buttons for 'Simpan Sementara' (Save Draft) and 'Upload Berkas' (Upload Documents).

Menunjuk Kuasa	TIDAK
Identitas Pemohon	
Nama Calon Presiden	Jokowidodo
NIK Calon Presiden	3231231242141241
Nama Calon Wakil Presiden	Bobi Ari
NIK Calon Wakil Presiden	3311233232323123
Alamat	Jalan Medan Merdeka
Email	bobi@email.com
Nomor Telepon	0888882222
Nomor Handphone	0888882222
Permohonan	
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019	

[Simpan Sementara](#) [Upload Berkas](#)

Pemohon melakukan permohonan dengan mengisi form, nama Presiden dan Wakil Presiden dan upload berkas;

Pengajuan Permohonan Online Presiden dan Wakil Presiden

The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) portal. The user is logged in as 'mazmur.alexander@gmail.com'. The page title is 'Tanda Terima Permohonan Online' under the category 'PERSILISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM'. The main content area features the logo of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the text 'MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL'. Below this, it displays 'TANDA TERIMA PERMOHONAN ONLINE' with the online number '1/PAN.ONLINE/PRESIDEN/2019'. A QR code is visible on the right side. The application details are as follows:

- Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019
- Pemohon : Jokowiwido & Jokowiwido 2
- Kuasa Pemohon :
- Tanggal : 01 Oktober 2018 Pukul : 12:57 WIB

NO.	DOKUMEN YANG DI UPLOAD
1	PERMOHONAN
2	DAFTAR ALAT BUKTI
3	SURAT KEPUTUSAN TERMOHON
4	KTP CALON PRESIDEN
5	KTP CALON WAKIL PRESIDEN

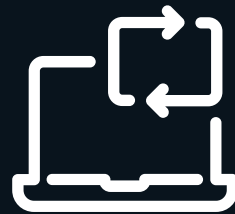
Signature information:

- Panitera: TTD Kasianur Sidauruk
- Pemohon: Jokowiwido & Jokowiwido 2

Catatan:

- Tanda terima permohonan online ini bukan bukti bahwa permohonan telah diregistrasi.
- Pemohon dapat melengkapi berkas permohonan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing 4 rangkap agar dapat diperiksa syarat kelengkapannya.
- Apabila yang menyerahkan bukan pemohon atau kuasa hukumnya harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.

Setelah melakukan pengisian form dan upload berkas pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan online



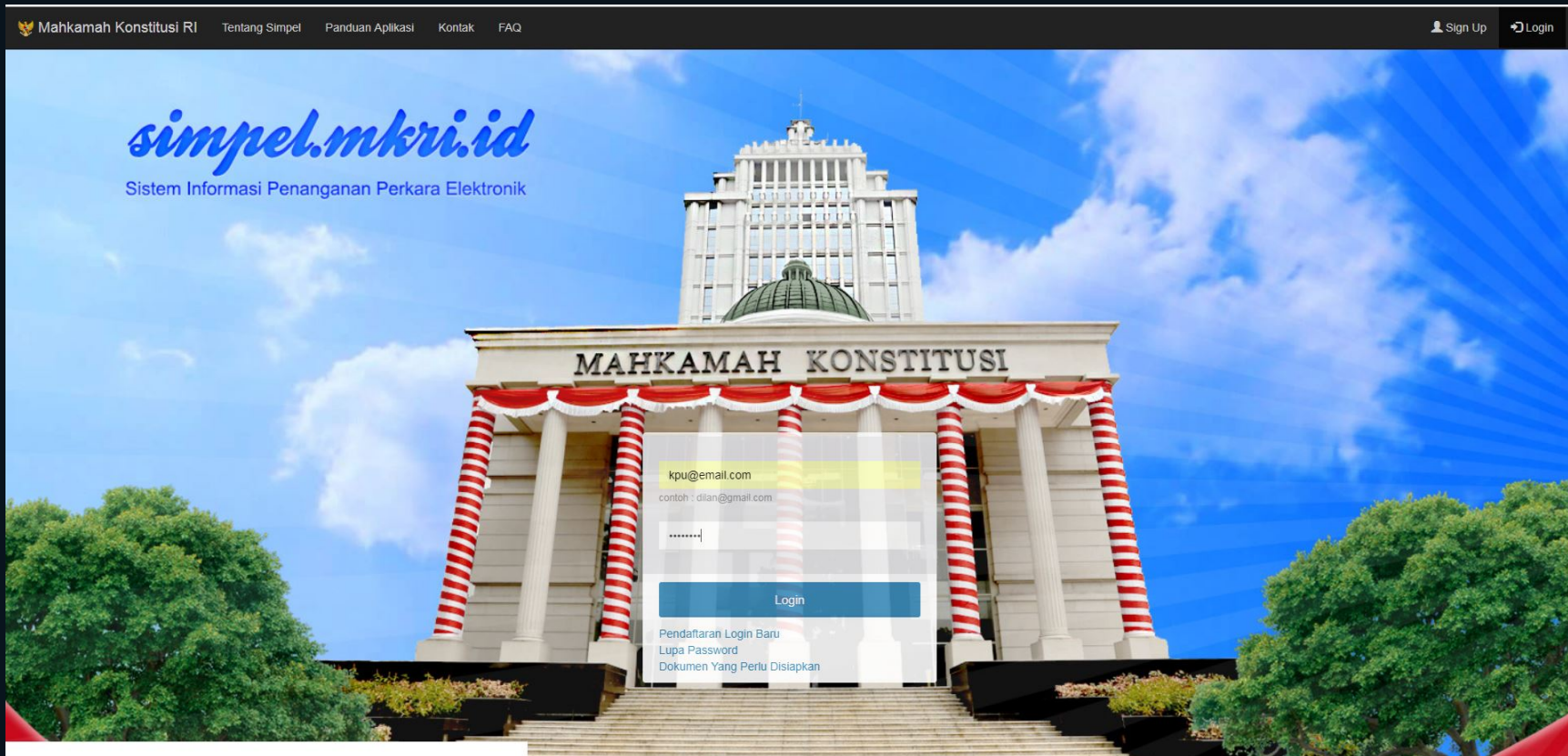
5. JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon

PMK No 4 tahun 2018 Pasal 15 ayat (1)

“Jawaban termohon diajukan oleh termohon kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.”

TERMOHON



KPU melakukan log in untuk mencetak jawaban termohon

TERMOHON

SIMPEL kpu@email.com

Jawaban Termohon Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dashboard > Permohonan Online > PHPU

Permohonan Online

Jawaban Termohon

Nomor Perkara	2/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama Termohon	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Email Termohon	setiawan.heru69@gmail.com
Pokok Jawaban	Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Kuasa Termohon	Heru
Email Kuasa Termohon	setiawan.heru69@gmail.com
Tanggal Surat Kuasa	27-09-2018
Upload Surat Kuasa	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Jawaban Termohon	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload SK Termohon	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Daftar Alat Bukti	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen

Form isian jawaban termohon

TERMOHON

SIMPEL kpu@email.com Online

Dashboard | Pilkada 2018 | Kunjungan Sidang | Informasi Perkara | Pileg 2019

Kamis, 27 September 2018
18:35:41

Tanda Terima Permohonan Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Permohonan Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

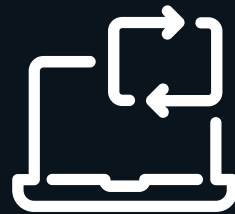
TANDA TERIMA JAWABAN TERMOHON ONLINE
Nomor Online : 1/PAN/ONLINE/JT/2018

C E T A K

Nomor Perkara : 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Nama Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Pokok Jawaban : Jawaban termohon terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Kuasa Termohon : Heru
Tanggal : 27 September 2018 Pukul : 18:35 WIB

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	JAWABAN TERMOHON	ADA
2.	KEPUTUSAN TERMOHON	TIDAK ADA
3.	SURAT KUASA	TIDAK ADA
4.	DAFTAR ALAT BUKTI	TIDAK ADA

Tanda terima online jawaban termohon, waktu permohonan online



5. KETERANGAN BAWASLU

KETERANGAN BAWASLU

Pasal 29 – 34 PMK No 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD)

Pasal 29 – 34 PMK No 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD)

Pasal 24 – 29 PMK No 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil Presiden)

Pasal 29 PMK No. 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD):

“Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU anggota DPR dan DPRD yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah”

Pasal 29 PMK No. 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD):

“Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU anggota DPD yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah”

KETERANGAN BAWASLU

Pasal 24 PMK No. 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil Presiden):

“Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah”

Pasal 30 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD),

Pasal 30 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD), dan

Pasal 25 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil Presiden):

“Keterangan Bawaslu diajukan ke Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan”

KETERANGAN BAWASLU

Pasal 34 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPR/DPRD),
Pasal 34 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2018 (PHPU ANGGOTA DPD), dan
Pasal 29 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2018 (PHPU Presiden & Wakil
Presiden):

**“ Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara *online*,
Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan
dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi
word (.doc) dan *pdf*”**

Keterangan Bawaslu

simpel.mkri.id
Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

MAHKAMAH KONSTITUSI

bawaslu@email.com

contoh : dilan@gmail.com

••••••••

Login

[Pendaftaran Login Baru](#)
[Lupa Password](#)
[Dokumen Yang Perlu Disiapkan](#)

Bawaslu melakukan log in

Keterangan Bawaslu

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'bawaslu@email.com', and a menu icon. The main content area is titled 'List Perkara' and features a table with two rows of case data. The left sidebar contains navigation links for 'Dashboard', 'Pilkada 2018', 'Kunjungan Sidang', 'Informasi Perkara', and 'Pileg 2019'. A date and time display at the bottom left of the sidebar shows 'Jumat, 19 Oktober 2018' and '16:29:25'.

Perkara DPR/DPRD **Perkara DPD** **Perkara Presiden**

Perkara

NO PERKARA	TANGGAL	PERMOHONAN	PEMOHON	KUASA	KETERANGAN BAWASLU
2/PAN/DPR-DPRD/2019	19-10-2018 10:48	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat Nasdem		Daftar Keterangan Bawaslu
1/PAN/DPR-DPRD/2019	18-10-2018 18:31	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR,DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa PKB		Tanda Terima Keterangan Bawaslu

Jumat, 19 Oktober 2018
16:29:25

Bawaslu klik daftar keterangan Bawaslu

Keterangan Bawaslu

SIMPEL ☰ bawaslu@email.com

Keterangan Bawaslu Online Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dashboard > Permohonan Online > PHPU

Permohonan Online

Keterangan Bawaslu

Nomor Perkara	<input type="text" value="2/PAN/DPR-DPRD/2019"/>
Nama	<input type="text" value="Badan Pengawas Pemilihan Umum"/>
Email	<input type="text"/>
Pokok Keterangan	<input type="text" value="Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019"/>
Upload Keterangan	<input type="text" value="Telusuri... Tidak ada berkas dipilih."/>
Upload Daftar Alat Bukti	<input type="text" value="Telusuri... Tidak ada berkas dipilih."/>

Jumat, 19 Oktober
2018
16:31:15

Upload Keterangan dan Upload Daftar Alat Bukti

Keterangan Bawaslu

SIMPEL bawaslu@email.com

bawaslu@email.com Online

- Dashboard
- Pilkada 2018
- Kunjungan Sidang
- Informasi Perkara
- Pileg 2019
 - Permohonan
 - Perkara

Jumat, 19 Oktober 2018
16:32:50



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA KETERANGAN BAWASLU ONLINE
Nomor Online : 7/PAN/ONLINE/BAWASLU/2018



Nomor Perkara : 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Pemberi Keterangan : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pokok Jawaban : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perkara nomor 2/PAN/DPR-DPRD/2019
Tanggal : 19 Oktober 2018 Pukul : 16:33 WIB

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1.	KETERANGAN	ADA
2.	DAFTAR ALAT BUKTI	ADA

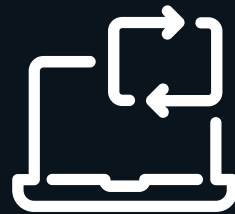
Panitera
TTD
Kasianur Sidaunuk

Bawaslu

Catatan :

- Tanda terima keterangan bawaslu online ini bukan sebagai bukti bahwa keterangan telah diregistrasi.
- Bawaslu segera melengkapi keterangan online ini dengan membawa dokumen - dokumen yang di butuhkan ke Mahkamah Konstitusi.
- Apabila yang menyerahkan bukan bawaslu harus ada surat kuasa untuk menyerahkan berkas.
- Abaikan apabila telah menyerahkan dokumen yg dipersyaratkan.

Tanda Terima Keterangan Bawaslu Online



6. Tempat Duduk Sidang;

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'ishak.purnama4@gmail.com', and a breadcrumb trail: 'Dashboard > Kunjungan Sidang > Jadwal Sidang'. The main content area is titled 'Kunjungan Sidang' and 'Jadwal Sidang Pemohon'. It features a table with the following data:

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVII/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

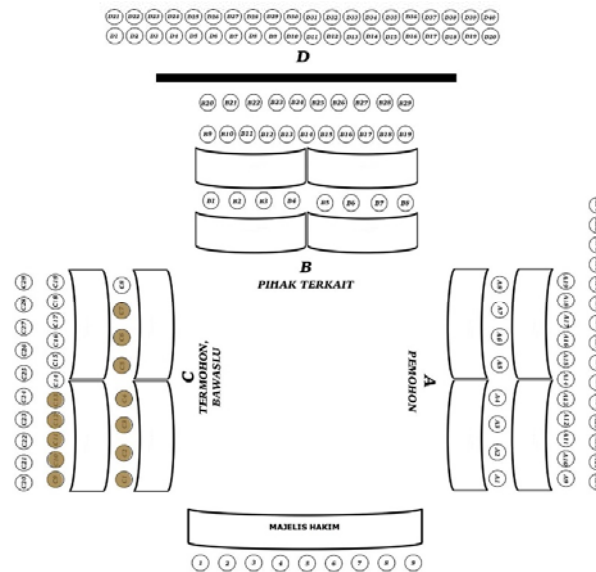
The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Pilkada 2018, Kunjungan Sidang (with a sub-menu for Jadwal Sidang), Informasi Perkara, and Pileg 2019. At the bottom of the sidebar, the date 'Kamis, 4 Oktober 2018' and the time '14:06:58' are displayed.

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

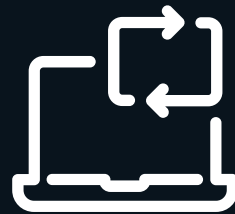
Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



7. Tracking Perkara;

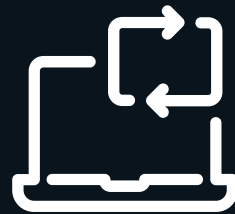
Tracking Perkara



Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Monitoring status perkara



8. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

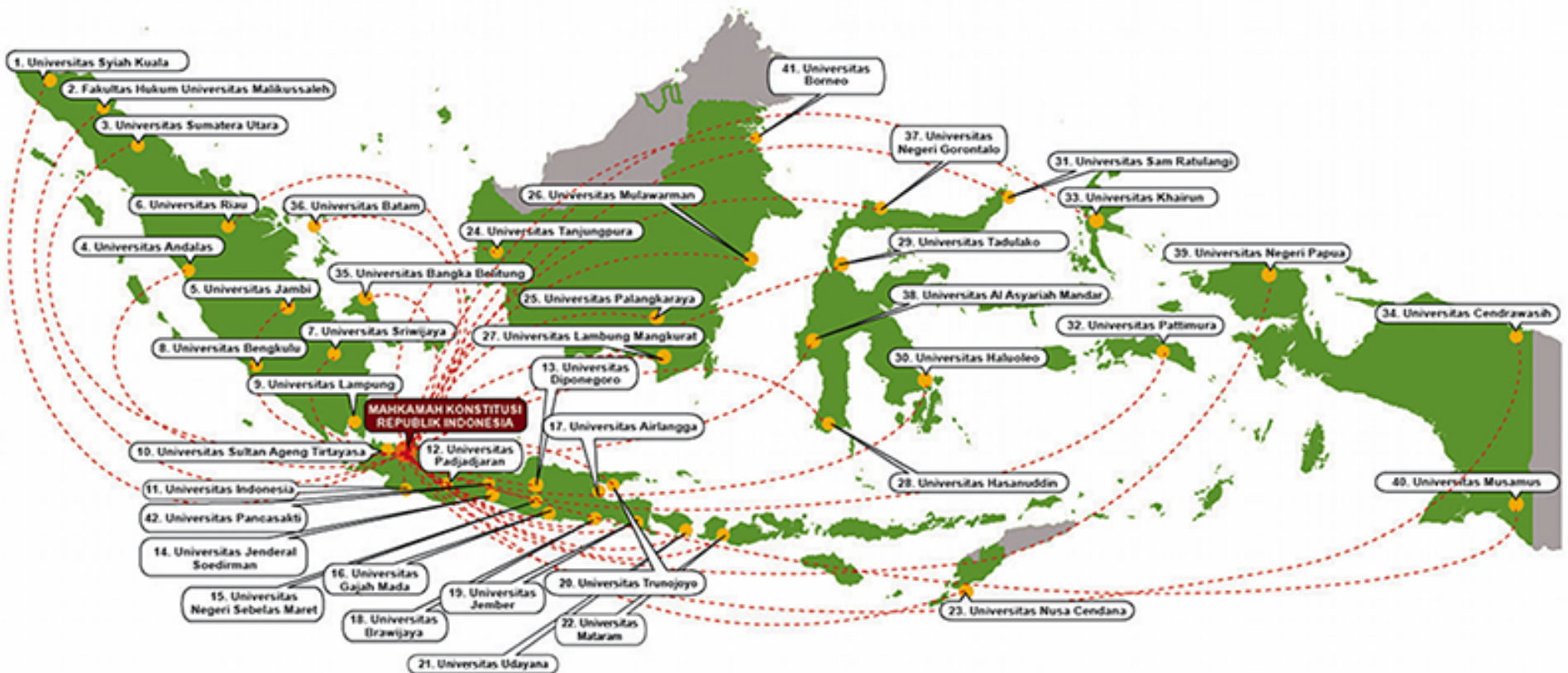
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



TERIMA KASIH